

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK PARKIR**

## **TESIS**



*Oleh :*

**A`ZAM**

**NPM. 051801050**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N**

**2007**

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK PARKIR**

## **TESIS**

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)  
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



*Oleh :*

**A`ZAM**

**NPM. 051801050**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N**

**2007**

PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

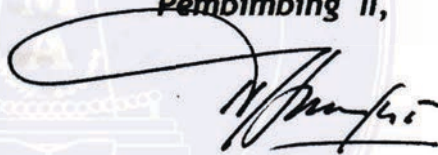
Nama : A`ZAM  
N I M : 051801050  
PROGRAM : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
JUDUL : Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir

*Pembimbing I,*



Drs. Amru Nasution, MKes

*Pembimbing II,*



Drs. Kariono, MA

*Ketua Program Studi ,*



Drs. Kariono, MA

*Direktur,*



Drs. Heri Kusmanto, MA

*Telah diuji pada Tanggal 15 Juni 2007*

=====



***Panitia Penguji Tesis :***

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA  
Sekretaris : Ir. Erwin Pane, MS  
Anggota I : Drs. Kariono, MA  
Anggota II : Drs. Amru Nasution, MKes  
Penguji Tamu : Drs. Usman Tarigan, MS

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK PARKIR

N A M A : A`zam  
N I M : 051801050  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Drs. Amru Nasution, MKes  
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Parkir. Ketentuan tentang Pajak Parkir telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah tersebut di atas dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diambil langkah-langkah dalam pengaturan pemberian izin Parkir dimaksud yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk maksud tersebut di atas Pemerintah Kota Medan melalui Keputusan Walikota telah menetapkan dengan keputusan Walikota Medan Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan. Pajak Parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah dari 7(tujuh) pajak daerah yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Medan dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Sampel diambil secara *purposive sampling*, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir, yang dilihat dari aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total skor 2,73, maka termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir tersebut telah berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir adalah : keterbatasan sarana dan prasarana; rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Medan masih relatif kecil, yaitu 1,06 persen pada tahun 2004 turun menjadi 1,00 persen tahun 2005. namun pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,02 persen. Kontribusi terbesar PAD Kota Medan adalah berasal dari Pajak Penerangan Jalan.

**Key words** : *Implementasi Kebijakan , Pajak Parkir, Kota Medan*

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TENTANG PAJAK PARKIR

N A M A : A`zam  
N I M : 051801050  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Drs. Amru Nasution, MKes  
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA

Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Parkir. Ketentuan tentang Pajak Parkir telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah tersebut di atas dan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang diharapkan, maka perlu diambil langkah-langkah dalam pengaturan pemberian izin Parkir dimaksud yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk maksud tersebut di atas Pemerintah Kota Medan melalui Keputusan Walikota telah menetapkan dengan keputusan Walikota Medan Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan. Pajak Parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah dari 7(tujuh) pajak daerah yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Medan dan kontribusi pajak parkir terhadap PAD. Sampel diambil secara *purposive sampling*, sebanyak 43 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir, yang dilihat dari aspek : komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu dengan rata-rata total skor 2,73, maka termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir tersebut telah berjalan secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Tentang Pajak Parkir adalah : keterbatasan sarana dan prasarana; rendahnya kesadaran masyarakat wajib pajak dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Medan masih relatif kecil, yaitu 1,06 persen pada tahun 2004 turun menjadi 1,00 persen tahun 2005. namun pada tahun 2006 terjadi peningkatan menjadi 1,02 persen. Kontribusi terbesar PAD Kota Medan adalah berasal dari Pajak Penerangan Jalan.

Key words : *Implementasi Kebijakan , Pajak Parkir, Kota Medan*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan tentang Pajak Parkir”**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dan belum mampunya penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mempunyai keharusan dan kewajiban moral yang tinggi untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas terselesaikannya tesis ini, terutama kepada mereka yang terlibat langsung dalam membedah dan membahas isi tulisan ini, yaitu :  
Yang terhormat kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.M Yacob Matondang,MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kumanto, MA, Direktur PPs Magister Admiistrasi Publik
3. Drs. Amru Nasution, Mkes, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran dalam penyempurnaan tesis ini
4. Bapak Drs. Kariono, MA, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, sekaligus sebagai Pembimbing II
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

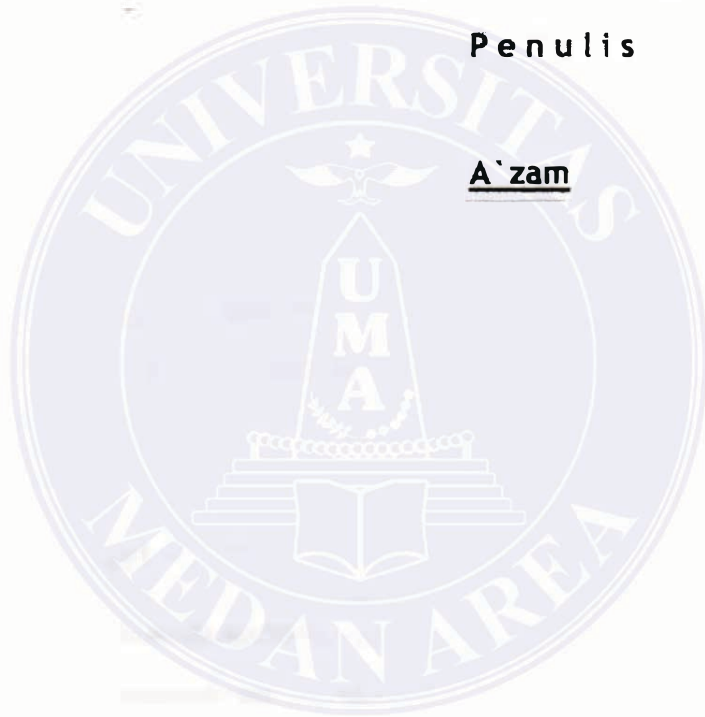
Terimakasih pula kepada kedua orang tua, Istri Tercinta dan keluarga, yang tidak pernah putus mengalirkan do'a dan memompakan semangat demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wataala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 10 Juni 2007

Penulis

A`zam





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kebijakan Publik .....	6
2.2. Implementasi Kebijakan .....	8
2.3. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia .....	17
2.4. Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah .....	18
2.5. Pajak Daerah .....	21
2.6. Keputusan Walikota Medan Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Pajak Parkir .....	26

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

3.1. Bentuk Penelitian.....	29
3.2. Populasi Sasaran.....	29
3.3. Rencana Sample .....	29
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.5. Operasionalisasi Variabel.....	31
3.6. Teknik Analisis Data .....	33

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN**

4.1. Profil Kota Medan .....	34
4.1.1. Historis kota Medan .....	34
4.1.2. Medan Dalam Pandangan Sosial budaya.....	36
4.1.3. Demografi Kota Medan.....	37
4.1.4. Geografis Kota Medan.....	38
4.1.5. Perekonomian Kota Medan.....	39
4.2. Visi dan Misi Kota Medan.....	42
4.2.1. Visi Kota Medani.....	42
4.2.2. Transformasi Kebijakan Pembangunan Kota ..	44
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Kota.....	45
4.3. Kependudukan.....	48
4.3.1. Komposisi Penduduk.....	51



4.4. Potensi Daerah .....	53
4.4.1. Lingkungan Bisnis .....	53
4.4.2. Kemitraan Antara Pemerintah Kota, Swasta dan Masyarakat.....	43
4.4.3. Peran Institusional Bisnis .....	54
4.4.4. Kebijakan Terhadap Investasi Asing.....	55
4.4.5. Dukungan Lembaga Keuangan .....	58

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

5.1. Hasil Penelitian.....	61
5.1.1. Karakteristik Responden .....	61
5.1.2. Variabel Penelitian .....	63
5.2. Analisis Data .....	77
5.2.1. Implementasi Kebijakan Pajak Parkir di Kota Medan .....	77
5.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan tentang Pajak Parkir dalam Rangka PAD Kota Medan .....	78
5.2.3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD kota Medan .....	82
5.2.4. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Peningkatan Pajak Parkir di Kota Meda.....	85

**BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan.....87

6,2. Saran - Saran .....88

**DAFTAR PUSTAKA .....89**

**LAMPIRAN.....**



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Di Kota Medan Tahun 2001 - 2005.....	49
4.2	Persentase Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kelompok Umur Tahun 2001 - 2005.....	51
4.3	Penggolongan Jenis dan Tarif Paling Tinggi dari Pajak Daerah.....	58
5.1	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin...	61
5.2	Distribusi Responden Menurut Umur .....	62
5.3	Distribusi Responden Menurut Pendidikan.....	62
5.4	Distribusi Responden Menurut Kedudukan dalam Kebijakan.....	63
5.5	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Pajak Parkir .....	63
5.6	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Tujuan Pajak Parkir .....	64
5.7	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Perangkat Aturan dalam Kebijakan Pajak Parkir .....	65
5.8	Pendapat Responden Tentang Pengetahuan Adanya Peraturan Tertulis dalam Pelaksanaan Kebijakan Pajak Parkir .....	65
5.9	Pendapat Responden Tentang Pemahaman Peraturan dalam Kebijakan Pajak Parkir .....	66

5.10	Pendapat Responden Tentang Hak dan Kewajiban dalam Kebijakan Pajak Parkir ...	67
5.11	Pendapat Responden Tentang Perkembangan Kegiatan dalam Kebijakan Pajak Parkir .....	67
5.12	Pendapat Responden Tentang Bentuk Aturan Pemerintah dalam Kebijakan Pajak Parkir .....	68
5.13	Pendapat Responden Tentang Ketersediaan Sumberdaya Alam dalam Mendukung Kelancaran Program .....	69
5.14	Pendapat Responden Tentang Kecukupan Dana untuk Mengelola Kegiatan yang Dilakukan dalam Kebijakan ...	70
5.15	Pendapat Responden Tentang Dukungan Prasarana untuk Menjalankan Kebijakan .....	71
5.16	Pendapat Responden Tentang Peranan Pemerintah dalam Kebijakan Pajak Parkir .....	72
5.17	Pendapat Responden Tentang Pengusaha Reklame Dalam Kebijakan Pajak Parkir .....	72
5.18	Pendapat Responden Tentang Peranan Wajib Pajak Parkir Dalam Kebijakan Pajak Parkir ...	73
5.19	Pendapat Responden Tentang Keterpaduan Komponen Pelaksanaan Dalam Kebijakan Pajak Parkir .....	74
5.20	Pendapat Responden Tentang Pengaruh dari Luar Komponen yang Terlibat dalam implementasi kebijakan Pajak Parkir.....	75
5.21	Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam Perencanaan implementasi kebijakan Pajak Parkir .....	75

5.22	Pendapat Responden Tentang Hambatan dalam implementasi kebijakan Pajak Parkir.....	76
5.23	Rata-rata Skor Implementasi Pajak Parkir di Kota Medan.....	78
5.24	Perkembangan Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2004-2006.....	83
5.25	Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap APBD dan PAD Kota Medan Tahun 2004 - 2006.....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Kota Medan selain merupakan ibukota Propinsi Sumatera Utara, juga mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan, dan pusat kegiatan pariwisata, serta merupakan pintu gerbang Indonesia bagian Barat dengan adanya pelabuhan laut Belawan, dan Bandar udara Polonia.

Sejalan dengan visi Kota Medan : Medan Kota Metropolitan Yang Modern, Madani Dan Religius. Kota modern yang akan diwujudkan adalah kota jasa, perdagangan, keuangan, dan pendidikan yang siap bersaing secara regional dan global dengan sistem lalu lintas keuangan yang efisien serta kompetitif dengan dukungan infra-struktur sosial ekonomi yang lengkap, pondasi per-ekonomian yang kuat, stabilitas keamanan, sosial - politik yang kondusif dan tata pemerintahan yang profesional serta pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia (sdm), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta iman dan taqwa (imtaq). Kota madani yang akan diwujudkan adalah kota yang beradab dan agamis sebagaimana tercermin dalam cara berfikir, sikap dan perilaku yang berbudaya, mandiri, menghargai ilmu pengetahuan, kemajemukan, adil, terbuka, serta demokratis. Kota religius yang akan diwujudkan adalah kota dengan masyarakat yang dinamis, menjunjung tinggi nilai, ajaran agama sehingga



menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral. Di samping itu makna pokok dari visi religius adalah terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan hidup ber-agama, antar umat beragama dan antar etnik serta antara umat beragama, etnik dengan pemerintah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.

Secara konseptual perkembangan kota yang demikian, tentunya menurut adanya titik pandang yang tepat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kota pada masa datang. Oleh karenanya pembangunan Kota Medan dalam cirri perkotaan yang memilikinya, dikembangkan dengan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan makro dan mikro. Dalam pendekatan Medan dalam cirri perkotaan yang memilikinya, dikembangkan dengan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan makro dan mikro. Dalam pendekatan makro, maka pembangun kota Medan didukung sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas baik secara regional maupun nasional. Sedang melalui pendekatan mikro ,pembangunan kota medan dipanddang sebagai suatu kesatuan lingkungan yang berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk, permukiman , kesempatan kerja .prasarana dan sarana perkotaan, tata ruang serta berbagaimasalah mikro lainnya.

Melalui pendekatan makro yang dikembangkan, diharapkan pembangunan Kota Medan dapat tumbuh dan berkembang sebagai kota metropolitan dalam sistem perkotaan secara nasional sehingga berfungsi mendukung pementapan struktur perekonomian nasional. Di samping itu pendekatan ini juga dimaksudkan agar dapat meninggalkan fungsi dan peran kota-kota sedang dan kecil agar lainnya yang berada disekitar kota Medan, khususnya sebagai kota-kota penyangga (*buffer cites*),

## DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Handyaningrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Pubtik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Republk Indonesia, 1992. *Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Republk Indonesia, 1999. *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Republk Indonesia, 2000. *Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Taentang Program Pembangunan Nasuional (PROPENAS) Tahun 2000-2004*. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Sugiyono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

- Tjokroamidjojo, Bintoro, **"Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan"**, Jakarta, 20 Juni 2000, *kertas kerja*.
- Toha, Miftah, 1991 (1987), ***Perspektif Perilaku Birokrasi***, Jakarta: Rajawali.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, ***Governance, Administration, and Development***, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, ***Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara***, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, Samudra, 1994. ***Evaluasi Kebijakan Publik***. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

